BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penanganan ekonomi akibat dampak dari *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* perlu dilakukan rasionalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b bahwa melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 *(Covid-19)* dan/ atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASSISTEN I

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN I	
Ka	
KABAG HUKUM	

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN I	
Ka	
KABAG HUKUM	

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN I	
Ka	
KABAG HUKUM	

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
23. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 54) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH

1.	Pendapatan		
	a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	70,235,630,500.00
	b. Dana Perimbangan	Rp	669,498,531,543.00
	c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp	157,385,810,747.00
	Jumlah Pendapatan	Rp	897,119,972,790.00
2.	Belanja		
	a. Belanja Tidak Langsung		
	1) Belanja pegawai	Rp	396,422,737,620.00
	2) Belanja bunga	Rp	-
	3) Belanja subsidi	Rp	-
	4) Belanja hibah	Rp	36,801,258,098.00
	5) Belanja bantuan sosial	Rp	1,999,400,000.00
	6) Belanja bagi hasil	Rp	1,509,156,000.00
	7) Belanja bantuan keuangan	Rp	124,420,929,000.00
	8) Belanja tidak terduga	Rp	23,544,482,271.59
		Rp	584,697,962,989.59
	b. Belanja Langsung		
	1) Belanja pegawai	Rp	93,658,903,407.00
	2) Belanja barang dan jasa	Rp	214,077,313,723.00
	3) Belanja modal	Rp	163,331,835,531.00
		Rp	471,068,052,661.00
	Jumlah Belanja	Rp	1,055,766,015,650.59
	Surplus / (Defisit)	Rp	(158,646,042,860.59)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan	Rp	158,646,042,860.59
	b. Pengeluaran	Rp	-
	Jumlah Pembiayaan Neto	Rp	158,646,042,860.59
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	Rp	-

2. Mengubah Lampiran I Peraturan Bupati Natuna Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 54) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Mengubah Lampiran II Peraturan Bupati Natuna Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 54) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN I	
Ka	
KABAG HUKUM	

4. Mengubah Lampiran IV Peraturan Bupati Natuna Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 54) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 13 Mei 2020

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 32

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN I	
Ka	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	**PENDAPATAN**				
4. 1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**76,718,528,000.00**	**70,235,630,500.00**	**(6,482,897,500.00)**	**(8.45)**
4. 1. 1.	Hasil Pajak Daerah	13,550,195,000.00	7,107,887,500.00	(6,442,307,500.00)	**(47.54)**
4. 1. 1. 01.	Pajak Hotel	126,500,000.00	63,250,000.00	(63,250,000.00)	**(100.00)**
4. 1. 1. 01. 06.	Hotel bintang satu	126,500,000.00	63,250,000.00	(63,250,000.00)	**(100.00)**
4. 1. 1. 02.	Pajak Restoran	2,751,500,000.00	1,375,750,000.00	(1,375,750,000.00)	**(100.00)**
4. 1. 1. 02. 01.	Restoran	2,751,500,000.00	1,375,750,000.00	(1,375,750,000.00)	**(100.00)**
4. 1. 1. 03.	Pajak Hiburan	35,000,000.00	17,500,000.00	(17,500,000.00)	**(100.00)**
4. 1. 1. 03. 02.	Pagelaran kesenian/musik/tari/busana	5,000,000.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	**(100.00)**
4. 1. 1. 03. 07.	Karaoke	25,000,000.00	12,500,000.00	(12,500,000.00)	**(100.00)**
4. 1. 1. 03. 10.	Permainan bilyar	3,000,000.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	**(100.00)**
4. 1. 1. 03. 18.	Pusat kebugaran	2,000,000.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	**(100.00)**
4. 1. 1. 04.	Pajak Reklame	91,805,000.00	55,083,000.00	(36,722,000.00)	**(66.67)**
4. 1. 1. 04. 01.	Reklame papan/bill board/vidiotron/megatron	78,805,000.00	47,283,000.00	(31,522,000.00)	**(66.67)**
4. 1. 1. 04. 02.	Reklame kain	10,000,000.00	6,000,000.00	(4,000,000.00)	**(66.67)**
4. 1. 1. 04. 05.	Reklame berjalan	3,000,000.00	1,800,000.00	(1,200,000.00)	**(66.67)**
4. 1. 1. 05.	Pajak Penerangan Jalan	7,381,025,000.00	3,690,512,500.00	(3,690,512,500.00)	**(100.00)**
4. 1. 1. 05. 01.	Pajak penerangan jalan PLN	5,112,000,000.00	2,556,000,000.00	(2,556,000,000.00)	**(100.00)**
4. 1. 1. 05. 02.	Pajak penerangan jalan non PLN	2,269,025,000.00	1,134,512,500.00	(1,134,512,500.00)	**(100.00)**
4. 1. 1. 06.	Pajak Parkir	7,865,000.00	6,292,000.00	(1,573,000.00)	**(25.00)**
4. 1. 1. 06. 01.	Pajak parkir	7,865,000.00	6,292,000.00	(1,573,000.00)	**(25.00)**
4. 1. 1. 07.	Pajak Air Tanah	2,500,000.00	2,500,000.00	0	**0**
4. 1. 1. 07. 01.	Pajak air tanah	2,500,000.00	2,500,000.00	0	**0**
4. 1. 1. 09.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,354,000,000.00	677,000,000.00	(677,000,000.00)	**(100.00)**
4. 1. 1. 09. 05.	Batu apung	5,000,000.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	**(100.00)**
4. 1. 1. 09. 06.	Tanah timbun	250,000,000.00	125,000,000.00	(125,000,000.00)	**(100.00)**
4. 1. 1. 09. 07.	Tanah urug	5,000,000.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	**(100.00)**
4. 1. 1. 09. 08.	Batu sirtu	300,000,000.00	150,000,000.00	(150,000,000.00)	**(100.00)**
4. 1. 1. 09. 09.	Batu granit/andesit	350,000,000.00	175,000,000.00	(175,000,000.00)	**(100.00)**
4. 1. 1. 09. 10.	Pasir kuarsa	300,000,000.00	150,000,000.00	(150,000,000.00)	**(100.00)**
4. 1. 1. 09. 11.	Pasir Koral	20,000,000.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	**(100.00)**
4. 1. 1. 09. 12.	Pasir Beton	70,000,000.00	35,000,000.00	(35,000,000.00)	**(100.00)**
4. 1. 1. 09. 13.	Koral Beton	54,000,000.00	27,000,000.00	(27,000,000.00)	**(100.00)**
4. 1. 1. 10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1,450,000,000.00	870,000,000.00	(580,000,000.00)	**(66.67)**
4. 1. 1. 10. 01.	Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	1,450,000,000.00	870,000,000.00	(580,000,000.00)	**(66.67)**
4. 1. 1. 11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	350,000,000.00	350,000,000.00	0	**0**
4. 1. 1. 11. 01.	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	350,000,000.00	350,000,000.00	0	**0**
4. 1. 2.	Hasil Retribusi Daerah	506,000,000.00	506,000,000.00	0	**0**
4. 1. 2. 01.	Retribusi Jasa Umum	316,000,000.00	316,000,000.00	0	**0**
4. 1. 2. 01. 01.	Retribusi pelayanan kesehatan	246,000,000.00	246,000,000.00	0	**0**
4. 1. 2. 01. 02.	Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	30,000,000.00	30,000,000.00	0	**0**
4. 1. 2. 01. 11.	Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus	10,000,000.00	10,000,000.00	0	**0**
4. 1. 2. 01. 14.	Retribusi pelayanan tera/tera ulang	30,000,000.00	30,000,000.00	0	**0**
4. 1. 2. 02.	Retribusi Jasa Usaha	70,000,000.00	70,000,000.00	0	**0**
4. 1. 2. 02. 11.	Retribusi penyeberangan di air	70,000,000.00	70,000,000.00	0	**0**
4. 1. 2. 03.	Retribusi Perizinan Tertentu	120,000,000.00	120,000,000.00	0	**0**
4. 1. 2. 03. 01.	Retribusi izin mendirikan bangunan	120,000,000.00	120,000,000.00	0	**0**
4. 1. 3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,539,837,000.00	10,539,837,000.00	0	**0**
4. 1. 3. 01.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	10,539,837,000.00	10,539,837,000.00	0	**0**
4. 1. 3. 01. 03.	Deviden BUMD	10,539,837,000.00	10,539,837,000.00	0	**0**
4. 1. 4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52,122,496,000.00	52,081,906,000.00	(40,590,000.00)	**(0.08)**
4. 1. 4. 02.	Penerimaan Jasa Giro	5,462,296,553.00	5,462,206,553.00	(90,000.00)	**0**

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASSISTEN I

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4. 1. 4. 02. 02.	Jasa giro pemegang kas	289,499,000.00	289,499,000.00	0	0
4. 1. 4. 03.	Pendapatan Bunga Deposito	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0	0
4. 1. 4. 03. 01.	Rekening deposito pada bank	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0	0
4. 1. 4. 07.	Pendapatan Denda Pajak	90,000,000.00	49,500,000.00	(40,500,000.00)	(81.82)
4. 1. 4. 07. 12.	Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	75,000,000.00	37,500,000.00	(37,500,000.00)	(100.00)
4. 1. 4. 07. 13.	Pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	15,000,000.00	12,000,000.00	(3,000,000.00)	(25.00)
4. 1. 4. 15.	Pendapatan BLUD	15,800,000,000.00	15,800,000,000.00	0	0
4. 1. 4. 15. 01.	Pendapatan BLUD	15,800,000,000.00	15,800,000,000.00	0	0
4. 1. 4. 16.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6,679,787,600.00	6,679,787,600.00	0	0
4. 1. 4. 16. 01.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6,679,787,600.00	6,679,787,600.00	0	0
4. 1. 4. 19.	Lain-lain Penerimaan	14,090,411,847.00	14,090,411,847.00	0	0
4. 1. 4. 19. 01.	Lain-lain Penerimaan	14,090,411,847.00	14,090,411,847.00	0	0
4. 2.	**Dana Perimbangan**	**966,769,081,000.00**	**669,498,531,543.00**	**(297,270,549,457.00)**	**(30.75)**
4. 2. 1.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	390,206,507,000.00	199,543,807,543.00	(190,662,699,457.00)	(48.86)
4. 2. 1. 01.	Bagi Hasil Pajak	86,991,686,000.00	99,262,310,234.00	12,270,624,234.00	12.36
4. 2. 1. 01. 01.	Bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan	70,257,171,000.00	83,994,301,037.00	13,737,130,037.00	16.35
4. 2. 1. 01. 02.	Bagi hasil dari pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPH pasal 21	14,148,696,800.00	12,543,576,959.00	(1,605,119,841.00)	(12.80)
4. 2. 1. 01. 03.	Bagi hasil dari biaya pungut PBB	2,421,051,200.00	2,693,592,991.00	272,541,791.00	10.12
4. 2. 1. 01. 04.	Bagi hasil cukai hasil tembakau	164,767,000.00	30,839,247.00	(133,927,753.00)	(434.28)
4. 2. 1. 02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	303,214,821,000.00	100,281,497,309.00	(202,933,323,691.00)	(202.36)
4. 2. 1. 02. 02.	Bagi hasil dari provisi sumber daya hutan	86,078,000.00	81,147,453.00	(4,930,547.00)	(6.08)
4. 2. 1. 02. 05.	Bagi hasil dari iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti)	3,788,888,300.00	4,415,632,567.00	626,744,267.00	14.19
4. 2. 1. 02. 06.	Bagi hasil dari pungutan pengusahaan perikanan	896,227,200.00	1,422,038,289.00	525,811,089.00	36.98
4. 2. 1. 02. 08.	Bagi hasil dari pertambangan minyak bumi	128,169,261,000.00	54,626,145,000.00	(73,543,116,000.00)	(134.63)
4. 2. 1. 02. 09.	Bagi hasil dari pertambangan gas bumi	170,274,366,500.00	39,736,534,000.00	(130,537,832,500.00)	(328.51)
4. 2. 2.	Dana Alokasi Umum	445,495,296,000.00	397,785,704,000.00	(47,709,592,000.00)	(10.71)
4. 2. 2. 01.	Dana Alokasi Umum	445,495,296,000.00	397,785,704,000.00	(47,709,592,000.00)	(11.99)
4. 2. 2. 01. 01.	Dana alokasi umum	445,495,296,000.00	397,785,704,000.00	(47,709,592,000.00)	(11.99)
4. 2. 3.	Dana Alokasi Khusus	131,067,278,000.00	72,169,020,000.00	(58,898,258,000.00)	(44.94)
4. 2. 3. 01.	Dana Alokasi Khusus Fisik	88,398,500,000.00	29,707,103,000.00	(58,691,397,000.00)	(197.57)
4. 2. 3. 01. 01.	DAK pendidikan	8,589,182,000.00	8,399,182,000.00	(190,000,000.00)	(2.26)
4. 2. 3. 01. 02.	DAK kesehatan	21,307,921,000.00	21,307,921,000.00	0	0
4. 2. 3. 01. 03.	DAK perumahan dan permukiman	3,588,702,000.00	0	(3,588,702,000.00)	0
4. 2. 3. 01. 04.	DAK pertanian	1,470,000,000.00	0	(1,470,000,000.00)	0
4. 2. 3. 01. 05.	DAK kelautan dan perikanan	1,090,498,000.00	0	(1,090,498,000.00)	0
4. 2. 3. 01. 07.	DAK pariwisata	3,498,714,000.00	0	(3,498,714,000.00)	0
4. 2. 3. 01. 08.	DAK air minum	3,549,969,000.00	0	(3,549,969,000.00)	0
4. 2. 3. 01. 09.	DAK sanitasi	5,139,984,000.00	0	(5,139,984,000.00)	0
4. 2. 3. 01. 10.	DAK jalan	32,863,891,000.00	0	(32,863,891,000.00)	0
4. 2. 3. 01. 12.	DAK irigasi	2,701,587,000.00	0	(2,701,587,000.00)	0
4. 2. 3. 01. 14.	DAK transportasi	4,598,052,000.00	0	(4,598,052,000.00)	0
4. 2. 3. 02.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	42,668,778,000.00	42,461,917,000.00	(206,861,000.00)	(0.49)
4. 2. 3. 02. 01.	Tunjangan khusus guru	434,721,000.00	358,129,000.00	(76,592,000.00)	(21.39)
4. 2. 3. 02. 02.	Tambahan penghasilan guru PNSD	696,000,000.00	760,500,000.00	64,500,000.00	8.48
4. 2. 3. 02. 03.	Tunjangan profesi guru PNSD	18,240,328,000.00	18,526,638,000.00	286,310,000.00	1.55
4. 2. 3. 02. 04.	Bantuan operasional penyelenggaraan PAUD (BOP)	2,237,400,000.00	2,162,400,000.00	(75,000,000.00)	(3.47)
4. 2. 3. 02. 05.	Bantuan operasional kesehatan	15,931,557,000.00	15,931,557,000.00	0	0
4. 2. 3. 02. 06.	BOP pendidikan kesetaraan	314,300,000.00	304,100,000.00	(10,200,000.00)	(3.35)
4. 2. 3. 02. 08.	Dana pelayanan kepariwisataan	1,016,804,000.00	664,050,000.00	(352,754,000.00)	(53.12)
4. 2. 3. 02. 09.	Bantuan operasional keluarga berencana	2,805,974,000.00	2,762,849,000.00	(43,125,000.00)	(1.56)
4. 2. 3. 02. 10.	Dana pelayanan administrasi kependudukan	991,694,000.00	991,694,000.00	0	0
4. 3.	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**173,712,391,000.00**	**157,385,810,747.00**	**(16,326,580,253.00)**	**(9.40)**
4. 3. 1.	Pendapatan Hibah	11,252,180,000.00	0	(11,252,180,000.00)	(100.00)
4. 3. 1. 01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	11,252,180,000.00	0	(11,252,180,000.00)	0
4. 3. 1. 01. 02.	Pendapatan BOS SD	8,047,513,000.00	0	(8,047,513,000.00)	0
4. 3. 1. 01. 03.	Pendapatan BOS SMP	3,204,667,000.00	0	(3,204,667,000.00)	0
4. 3. 3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	64,558,001,000.00	63,823,621,747.00	(734,379,253.00)	(1.14)
4. 3. 3. 01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	64,558,001,000.00	63,823,621,747.00	(734,379,253.00)	(1.15)
4. 3. 3. 01. 01	Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor	14,845,688,000.00	11,890,848,681.00	(2,954,839,319.00)	(24.85)
4. 3. 3. 01. 02	Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor	7,163,554,000.00	9,046,917,373.00	1,883,363,373.00	20.82
4. 3. 3. 01. 03	Bagi hasil dari pajak bahan bakar kenderaan bermotor	34,290,465,000.00	34,835,087,757.00	544,622,757.00	1.56

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN I
Ka.

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4. 3. 5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0	500,000,000.00	500,000,000.00	0
4. 3. 5. 01.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	0	500,000,000.00	500,000,000.00	100.00
4. 3. 5. 01. 01.	Bantuan keuangan dari Provinsi lain-lain	0	500,000,000.00	500,000,000.00	100.00
4. 3. 7.	Lain-lain Penerimaan	97,902,210,000.00	93,062,189,000.00	(4,840,021,000.00)	(4.94)
4. 3. 7. 01.	Lain-lain penerimaan	97,902,210,000.00	93,062,189,000.00	(4,840,021,000.00)	(5.20)
4. 3. 7. 01. 01.	Dana Desa	65,689,444,000.00	64,932,954,000.00	(756,490,000.00)	(1.17)
4. 3. 7. 01. 02.	Dana Insentif Daerah	32,212,766,000.00	28,129,235,000.00	(4,083,531,000.00)	(14.52)
	Jumlah	**1,217,200,000,000.00**	**897,119,972,790.00**	**(320,080,027,210.00)**	**(35.68)**
5.	**BELANJA**				
5. 1.	**Belanja Tidak Langsung**	**534,683,756,504.00**	**584,697,962,989.59**	**50,014,206,485.59**	**9.35**
5. 1. 1.	Belanja Pegawai	345,946,201,906.00	396,422,737,620.00	50,476,535,714.00	14.59
5. 1. 1. 01.	Gaji dan Tunjangan	200,803,359,506.00	193,068,026,232.00	(7,735,333,274.00)	(4.01)
5. 1. 1. 01. 01.	Gaji pokok PNS/uang representasi 1)	138,436,005,506.00	127,878,702,840.00	(10,557,302,666.00)	(8.26)
5. 1. 1. 01. 02.	Tunjangan keluarga	14,087,156,000.00	12,334,459,900.00	(1,752,696,100.00)	(14.21)
5. 1. 1. 01. 03.	Tunjangan jabatan 1)	6,649,891,000.00	7,214,840,500.00	564,949,500.00	7.83
5. 1. 1. 01. 04.	Tunjangan fungsional	5,559,605,000.00	5,283,368,000.00	(276,237,000.00)	(5.23)
5. 1. 1. 01. 06.	Tunjangan beras 1)	8,285,354,000.00	8,561,101,080.00	275,747,080.00	3.22
5. 1. 1. 01. 07.	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	57,252,000.00	113,979,940.00	56,727,940.00	49.77
5. 1. 1. 01. 08.	Pembulatan gaji	1,837,000.00	1,908,720.00	71,720.00	3.76
5. 1. 1. 01. 09.	Iuran asuransi kesehatan	3,851,086,000.00	7,022,898,216.00	3,171,812,216.00	45.16
5. 1. 1. 01. 10.	Uang paket 2)	41,580,000.00	41,580,000.00	0	0
5. 1. 1. 01. 15.	Tunjangan alat kelengkapan lainnya 2)	13,824,000.00	13,824,000.00	0	0
5. 1. 1. 01. 16.	Tunjangan perumahan 2)	107,712,000.00	107,712,000.00	0	0
5. 1. 1. 01. 17.	Uang duka wafat/tewas 2)	184,284,000.00	184,284,000.00	0	0
5. 1. 1. 01. 18.	Uang jasa pengabdian 2)	165,156,000.00	165,156,000.00	0	0
5. 1. 1. 01. 19.	Belanja penunjang operasional pimpinan DPRD	216,720,000.00	216,720,000.00	0	0
5. 1. 1. 01. 21.	Tunjangan umum	2,568,606,000.00	3,086,790,000.00	518,184,000.00	16.79
5. 1. 1. 01. 22.	Iuran jaminan kecelakaan kerja	280,345,000.00	263,289,660.00	(17,055,340.00)	(6.48)
5. 1. 1. 01. 23.	Iuran jaminan kematian	840,853,000.00	1,121,318,376.00	280,465,376.00	25.01
5. 1. 1. 01. 24.	Tunjangan alat kelengkapan 2)	85,044,000.00	85,044,000.00	0	0
5. 1. 1. 01. 25.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	18,240,328,000.00	18,240,328,000.00	0	0
5. 1. 1. 01. 26.	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	696,000,000.00	696,000,000.00	0	0
5. 1. 1. 01. 27.	Tunjangan Khusus Guru PNSD	434,721,000.00	434,721,000.00	0	0
5. 1. 1. 02.	Tambahan Penghasilan PNS	138,355,274,400.00	196,567,143,388.00	58,211,868,988.00	29.61
5. 1. 1. 02. 01.	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	57,320,408,000.00	51,011,358,060.00	(6,309,049,940.00)	(12.37)
5. 1. 1. 02. 02.	Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas	2,705,923,000.00	3,455,334,448.00	749,411,448.00	21.69
5. 1. 1. 02. 03.	Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja	1,532,068,400.00	2,301,085,272.00	769,016,872.00	33.42
5. 1. 1. 02. 04.	Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	2,966,241,000.00	4,187,552,692.00	1,221,311,692.00	29.17
5. 1. 1. 02. 05.	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja	55,966,998,000.00	105,539,147,520.00	49,572,149,520.00	46.97
5. 1. 1. 02. 06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	17,863,636,000.00	30,072,665,396.00	12,209,029,396.00	40.60
5. 1. 1. 03.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	6,787,568,000.00	6,787,568,000.00	0	0
5. 1. 1. 03. 01.	Tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD	2,520,000,000.00	2,520,000,000.00	0	0
5. 1. 1. 03. 02.	Belanja penunjang operasional KDH/WKDH	1,303,568,000.00	1,303,568,000.00	0	0
5. 1. 1. 03. 03.	Tunjangan reses	210,000,000.00	210,000,000.00	0	0
5. 1. 1. 03. 04.	Tunjangan transportasi	2,754,000,000.00	2,754,000,000.00	0	0
5. 1. 1. 06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0	0	0	0
5. 1. 1. 06. 01.	Insentif pemungutan retribusi daerah	0	0	0	0
5. 1. 4.	Belanja Hibah	37,170,857,098.00	36,801,258,098.00	(369,599,000.00)	(0.99)
5. 1. 4. 01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	28,500,000,000.00	28,627,901,000.00	127,901,000.00	0.45
5. 1. 4. 01. 01.	Pemerintah pusat	28,500,000,000.00	28,627,901,000.00	127,901,000.00	0.45
5. 1. 4. 05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	7,977,440,000.00	7,479,940,000.00	(497,500,000.00)	(6.65)
5. 1. 4. 05. 01.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang keagamaan	5,175,000,000.00	5,075,000,000.00	(100,000,000.00)	(1.97)
5. 1. 4. 05. 07.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang sosial kemasyarakatan	250,000,000.00	250,000,000.00	0	0
5. 1. 4. 05. 08.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang pendidikan dan penelitian	795,000,000.00	397,500,000.00	(397,500,000.00)	(100.00)
5. 1. 4. 05. 09.	Belanja Hibah BOP PAUD	1,652,400,000.00	1,652,400,000.00	0	0
5. 1. 4. 05. 10.	Belanja hibah BOP Pendidikan Kesetaraan	105,040,000.00	105,040,000.00	0	0
5. 1. 4. 10.	Belanja Hibah kepada Partai Politik	693,417,098.00	693,417,098.00	0	0

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASSISTEN I
Ka.

1	2	3	4	5	6
5. 1. 5.	Belanja Bantuan Sosial	500,000,000.00	1,999,400,000.00	1,499,400,000.00	**299.88**
5. 1. 5. 01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Masyarakat	500,000,000.00	1,999,400,000.00	1,499,400,000.00	**74.99**
5. 1. 5. 01. 02.	Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan untuk perlindungan sosial	500,000,000.00	1,999,400,000.00	1,499,400,000.00	**74.99**
5. 1. 6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	1,509,156,000.00	1,509,156,000.00	0	**0**
5. 1. 6. 03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	1,446,366,000.00	1,446,366,000.00	0	**0**
5. 1. 6. 03. 01.	Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa	1,446,366,000.00	1,446,366,000.00	0	**0**
5. 1. 6. 05.	Belanja Bagi Hasil Restribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	62,790,000.00	62,790,000.00	0	**0**
5. 1. 6. 05. 01.	Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan desa	62,790,000.00	62,790,000.00	0	**0**
5. 1. 7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	149,057,541,500.00	124,420,929,000.00	(24,636,612,500.00)	**(16.53)**
5. 1. 7. 03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	149,057,541,500.00	124,420,929,000.00	(24,636,612,500.00)	**(19.80)**
5. 1. 7. 03. 01.	Belanja alokasi dana desa	83,368,097,500.00	59,487,975,000.00	(23,880,122,500.00)	**(40.14)**
5. 1. 7. 03. 02.	Belanja dana desa	65,689,444,000.00	64,932,954,000.00	(756,490,000.00)	**(1.17)**
5. 1. 8.	Belanja Tidak Terduga	500,000,000.00	23,544,482,271.59	23,044,482,271.59	**4,608.90**
5. 1. 8. 01.	Belanja Tidak Terduga	500,000,000.00	23,544,482,271.59	23,044,482,271.59	**97.88**
5. 1. 8. 01. 01.	Belanja tidak terduga	500,000,000.00	23,544,482,271.59	23,044,482,271.59	**97.88**
5. 2.	**Belanja Langsung**	**815,518,243,496.00**	**471,068,052,661.00**	**(344,450,190,835.00)**	**(42.24)**
5. 2. 1.	Belanja Pegawai	91,171,773,640.00	93,658,903,407.00	2,487,129,767.00	**2.73**
5. 2. 1. 01.	Honorarium PNS	9,187,044,283.00	8,188,291,821.00	(998,752,462.00)	**(12.20)**
5. 2. 1. 01. 01.	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,485,620,000.00	3,123,525,000.00	(362,095,000.00)	**(11.59)**
5. 2. 1. 01. 02.	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	3,100,000.00	10,300,000.00	7,200,000.00	**69.90**
5. 2. 1. 01. 04.	Honorarium panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan	10,800,000.00	18,000,000.00	7,200,000.00	**40.00**
5. 2. 1. 01. 05.	Honorarium petugas/pengawas lapangan/peserta kegiatan	897,809,200.00	531,510,000.00	(366,299,200.00)	**(68.92)**
5. 2. 1. 01. 06.	Honorarium jasa pelayanan	1,900,145,083.00	1,845,866,821.00	(54,278,262.00)	**(2.94)**
5. 2. 1. 01. 07.	Honorarium dana BOS/BROS/BOP PAUD	522,000,000.00	522,000,000.00	0	**0**
5. 2. 1. 01. 08.	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/fasilitator PNS	389,720,000.00	121,380,000.00	(268,340,000.00)	**(221.07)**
5. 2. 1. 01. 09.	Honorarium pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik PNS	851,450,000.00	933,550,000.00	82,100,000.00	**8.79**
5. 2. 1. 01. 10.	Honorarium pengembangan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah PNS	1,126,400,000.00	1,082,160,000.00	(44,240,000.00)	**(4.09)**
5. 2. 1. 02.	Honorarium Non PNS	79,952,033,324.00	84,924,811,586.00	4,972,778,262.00	**5.86**
5. 2. 1. 02. 01.	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	263,300,000.00	185,900,000.00	(77,400,000.00)	**(41.64)**
5. 2. 1. 02. 02.	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	55,583,336,620.00	53,074,686,620.00	(2,508,650,000.00)	**(4.73)**
5. 2. 1. 02. 03.	Honorarium staf administrasi kegiatan	5,400,000.00	5,400,000.00	0	**0**
5. 2. 1. 02. 04.	Honorarium petugas/pengawas lapangan/peserta kegiatan	20,575,690,000.00	20,018,890,000.00	(556,800,000.00)	**(2.78)**
5. 2. 1. 02. 05.	Honorarium jasa pelayanan	2,132,306,704.00	2,013,332,966.00	(118,973,738.00)	**(5.91)**
5. 2. 1. 02. 06.	Honorarium dana BOS/BROS/BOP PAUD	900,000,000.00	900,000,000.00	0	**0**
5. 2. 1. 02. 07.	Honorarium pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik Non PNS	262,000,000.00	206,000,000.00	(56,000,000.00)	**(27.18)**
5. 2. 1. 02. 08.	Honorarium pengembangan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Non PNS	230,000,000.00	220,100,000.00	(9,900,000.00)	**(4.50)**
5. 2. 1. 02. 09.	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	0	8,300,502,000.00	8,300,502,000.00	**100.00**
5. 2. 1. 03.	Uang Lembur	7,797,000.00	0	(7,797,000.00)	**0**
5. 2. 1. 03. 01.	Uang lembur PNS	2,673,000.00	0	(2,673,000.00)	**0**
5. 2. 1. 03. 02.	Uang lembur non PNS	5,124,000.00	0	(5,124,000.00)	**0**
5. 2. 1. 05.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0	0	0	**0**
5. 2. 1. 05. 01.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	0	0	0	**0**
5. 2. 1. 06.	Belanja Pegawai BLUD	545,800,000.00	545,800,000.00	0	**0**
5. 2. 1. 06. 01.	Belanja pegawai BLUD	545,800,000.00	545,800,000.00	0	**0**
5. 2. 1. 07.	Belanja Pegawai Dana BOS	1,479,099,033.00	0	(1,479,099,033.00)	**0**
5. 2. 1. 07. 01.	Belanja Pegawai Dana BOS	1,479,099,033.00	0	(1,479,099,033.00)	**0**
5. 2. 2.	Belanja Barang dan Jasa	409,906,742,376.00	214,077,313,723.00	(195,829,428,653.00)	**(47.77)**
5. 2. 2. 01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16,727,285,271.00	17,444,878,996.00	717,593,725.00	**4.11**
5. 2. 2. 01. 01.	Belanja alat tulis kantor	8,343,466,056.00	6,161,519,376.00	(2,181,946,680.00)	**(35.41)**
5. 2. 2. 01. 02.	Belanja dokumentasi/administrasi tender	62,793,687.00	51,793,687.00	(11,000,000.00)	**(21.24)**
5. 2. 2. 01. 03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battry kering)	505,524,000.00	341,881,775.00	(163,642,225.00)	**(47.87)**
5. 2. 2. 01. 04.	Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	1,394,741,920.00	926,522,000.00	(468,219,920.00)	**(50.54)**

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN I
Ka
KABIG HUKUM

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5. 2. 2. 01. 05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,835,060,000.00	1,502,017,350.00	(333,042,650.00)	(22.17)
5. 2. 2. 01. 06.	Belanja bahan bakar minyak/gas	2,667,489,800.00	1,669,255,300.00	(998,234,500.00)	(59.80)
5. 2. 2. 01. 08.	Belanja pengisian tabung gas	10,900,000.00	8,800,000.00	(2,100,000.00)	(23.86)
5. 2. 2. 01. 09.	Belanja spanduk	1,256,954,808.00	884,589,308.00	(372,365,500.00)	(42.09)
5. 2. 2. 01. 10.	Belanja dekorasi	650,355,000.00	378,725,200.00	(271,629,800.00)	(71.72)
5. 2. 2. 01. 11.	Belanja bahan medis pakai habis	0	5,519,775,000.00	5,519,775,000.00	100.00
5. 2. 2. 02.	Belanja Bahan/Material	23,828,191,437.00	16,266,881,941.00	(7,561,309,496.00)	(46.48)
5. 2. 2. 02. 01.	Belanja bahan baku bangunan	216,260,000.00	56,690,000.00	(159,570,000.00)	(281.48)
5. 2. 2. 02. 02.	Belanja bahan/bibit tanaman	256,000,000.00	84,900,000.00	(171,100,000.00)	(201.53)
5. 2. 2. 02. 03.	Belanja bibit ternak	16,973,000.00	1,530,000.00	(15,443,000.00)	(1,009.35)
5. 2. 2. 02. 04.	Belanja bahan obat-obatan	7,881,283,581.00	6,240,708,081.00	(1,640,575,500.00)	(26.29)
5. 2. 2. 02. 05.	Belanja bahan kimia	525,640,000.00	123,890,000.00	(401,750,000.00)	(324.28)
5. 2. 2. 02. 06.	Belanja bahan alat-alat olahraga	52,170,000.00	49,650,000.00	(2,520,000.00)	(5.08)
5. 2. 2. 02. 07.	Belanja alat perlengkapan	13,542,114,856.00	9,408,713,860.00	(4,133,400,996.00)	(43.93)
5. 2. 2. 02. 08.	Belanja material/hadiah	1,277,050,000.00	248,100,000.00	(1,028,950,000.00)	(414.73)
5. 2. 2. 02. 10.	Belanja pengadaan tempat sampah	60,700,000.00	52,700,000.00	(8,000,000.00)	(15.18)
5. 2. 2. 03.	Belanja Jasa Kantor	36,192,657,837.00	26,992,046,087.00	(9,200,611,750.00)	(34.09)
5. 2. 2. 03. 01.	Belanja air	938,733,480.00	715,430,230.00	(223,303,250.00)	(31.21)
5. 2. 2. 03. 02.	Belanja telepon	265,960,000.00	220,560,000.00	(45,400,000.00)	(20.58)
5. 2. 2. 03. 03.	Belanja listrik	5,784,763,000.00	5,051,027,300.00	(733,735,700.00)	(14.53)
5. 2. 2. 03. 04.	Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0
5. 2. 2. 03. 05.	Belanja surat kabar/majalah	1,024,600,000.00	614,614,500.00	(409,985,500.00)	(66.71)
5. 2. 2. 03. 06.	Belanja kawat/faksimili/internet	4,063,695,472.00	3,598,701,672.00	(464,993,800.00)	(12.92)
5. 2. 2. 03. 07.	Belanja paket/pengiriman	358,897,000.00	268,681,000.00	(90,216,000.00)	(33.58)
5. 2. 2. 03. 08.	Belanja sertifikasi	240,616,000.00	209,616,000.00	(31,000,000.00)	(14.79)
5. 2. 2. 03. 11.	Belanja jasa adminstrasi pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor	18,000,000.00	19,500,000.00	1,500,000.00	7.69
5. 2. 2. 03. 12.	Belanja jasa penghargaan/prestasi	0	0	0	0
5. 2. 2. 03. 13.	Belanja jasa medis/laboratorium	5,282,471,000.00	3,413,290,400.00	(1,869,180,600.00)	(54.76)
5. 2. 2. 03. 14.	Belanja jasa kebersihan	2,291,700,000.00	2,126,867,100.00	(164,832,900.00)	(7.75)
5. 2. 2. 03. 15.	Belanja jasa kesenian	554,000,000.00	134,400,000.00	(419,600,000.00)	(312.20)
5. 2. 2. 03. 16.	Belanja jasa administrasi	4,608,510,385.00	2,514,360,385.00	(2,094,150,000.00)	(83.29)
5. 2. 2. 03. 17.	Belanja jasa publikasi	5,115,576,500.00	4,304,420,500.00	(811,156,000.00)	(18.84)
5. 2. 2. 03. 19.	Belanja jasa humas	5,000,000,000.00	3,600,000,000.00	(1,400,000,000.00)	(38.89)
5. 2. 2. 03. 20.	Belanja jasa protokol	1,000,000.00	0	(1,000,000.00)	0
5. 2. 2. 03. 21.	Belanja jasa keamanan	61,000,000.00	11,000,000.00	(50,000,000.00)	(454.55)
5. 2. 2. 03. 22.	Belanja perangkat lunak (software)	178,000,000.00	50,382,000.00	(127,618,000.00)	(253.30)
5. 2. 2. 03. 23.	Belanja jasa pengolahan data	250,000,000.00	60,000,000.00	(190,000,000.00)	(316.67)
5. 2. 2. 03. 24.	Belanja upah	145,135,000.00	69,195,000.00	(75,940,000.00)	(109.75)
5. 2. 2. 04.	Belanja Premi Asuransi	12,607,241,681.00	12,444,938,211.00	(162,303,470.00)	(1.30)
5. 2. 2. 04. 01.	Belanja premi asuransi kesehatan	12,203,490,011.00	12,067,031,661.00	(136,458,350.00)	(1.13)
5. 2. 2. 04. 03.	Belanja premi asuransi kecelakaan kerja	104,444,830.00	97,983,550.00	(6,461,280.00)	(6.59)
5. 2. 2. 04. 04.	Belanja premi asuransi kematian	299,306,840.00	279,923,000.00	(19,383,840.00)	(6.92)
5. 2. 2. 05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10,947,117,820.00	7,594,777,009.00	(3,352,340,811.00)	(44.14)
5. 2. 2. 05. 01.	Belanja jasa service	2,240,144,444.00	1,539,911,171.00	(700,233,273.00)	(45.47)
5. 2. 2. 05. 02.	Belanja penggantian suku cadang	3,226,998,000.00	2,004,330,000.00	(1,222,668,000.00)	(61.00)
5. 2. 2. 05. 03.	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	4,772,102,544.00	3,697,704,566.00	(1,074,397,978.00)	(29.06)
5. 2. 2. 05. 05.	Belanja surat tanda nomor kendaraan	707,872,832.00	352,831,272.00	(355,041,560.00)	(100.63)
5. 2. 2. 06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,685,996,588.00	7,264,913,061.00	(4,421,083,527.00)	(60.86)
5. 2. 2. 06. 01.	Belanja cetak	6,009,347,672.00	3,418,801,517.00	(2,590,546,155.00)	(75.77)
5. 2. 2. 06. 02.	Belanja penggandaan	5,109,724,469.00	3,641,557,097.00	(1,468,167,372.00)	(40.32)
5. 2. 2. 06. 03.	Belanja dokumentasi	566,924,447.00	204,554,447.00	(362,370,000.00)	(177.15)
5. 2. 2. 07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,326,057,000.00	1,775,140,000.00	(2,550,917,000.00)	(143.70)
5. 2. 2. 07. 01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	360,000,000.00	324,000,000.00	(36,000,000.00)	(11.11)
5. 2. 2. 07. 02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2,970,167,000.00	1,083,380,000.00	(1,886,787,000.00)	(174.16)
5. 2. 2. 07. 03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	995,890,000.00	367,760,000.00	(628,130,000.00)	(170.80)
5. 2. 2. 08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,914,868,000.00	2,138,974,000.00	(2,775,894,000.00)	(129.78)
5. 2. 2. 08. 01.	Belanja sewa sarana mobilitas darat	2,457,056,000.00	820,715,000.00	(1,636,341,000.00)	(199.38)
5. 2. 2. 08. 02.	Belanja sewa sarana mobilitas air	2,457,812,000.00	1,318,259,000.00	(1,139,553,000.00)	(86.44)
5. 2. 2. 09.	Belanja Sewa Alat Berat	0	0	0	0
5. 2. 2. 09. 03.	Belanja sewa bomag, loader, beco loader, hydro trailler, graider	0	0	0	0
5. 2. 2. 10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	640,100,000.00	318,600,000.00	(321,500,000.00)	(100.91)
5. 2. 2. 10. 01.	Belanja sewa meja kursi	44,000,000.00	27,000,000.00	(17,000,000.00)	(62.96)
5. 2. 2. 10. 04.	Belanja sewa generator	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0
5. 2. 2. 10. 05.	Belanja sewa tenda	183,500,000.00	77,000,000.00	(106,500,000.00)	(138.31)
5. 2. 2. 10. 07.	Belanja sewa peralatan sound sistem	386,100,000.00	211,600,000.00	(174,500,000.00)	(82.47)

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASSISTEN I

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5. 2. 2. 10. 09.	Belanja sewa perlengkapan media peliputan acara	23,500,000.00	0	(23,500,000.00)	0
5. 2. 2. 11.	Belanja Makanan dan Minuman	30,802,344,230.00	15,355,404,925.00	(15,446,939,305.00)	(100.60)
5. 2. 2. 11. 01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3,206,505,000.00	1,695,222,000.00	(1,511,283,000.00)	(89.15)
5. 2. 2. 11. 02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6,492,197,000.00	3,178,537,500.00	(3,313,659,500.00)	(104.25)
5. 2. 2. 11. 03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2,190,740,000.00	1,543,191,400.00	(647,548,600.00)	(41.96)
5. 2. 2. 11. 04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17,205,202,230.00	8,509,554,025.00	(8,695,648,205.00)	(102.19)
5. 2. 2. 11. 05.	Belanja makanan dan minuman pelajar/siswa	1,278,800,000.00	0	(1,278,800,000.00)	0
5. 2. 2. 11. 06.	Belanja makanan dan minuman pasien	428,900,000.00	428,900,000.00	0	0
5. 2. 2. 12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	590,808,000.00	135,580,000.00	(455,228,000.00)	(335.76)
5. 2. 2. 12. 01.	Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH	0	0	0	0
5. 2. 2. 12. 02.	Belanja pakaian sipil harian (PSH)	113,870,000.00	0	(113,870,000.00)	0
5. 2. 2. 12. 03.	Belanja pakaian sipil lengkap (PSL)	115,080,000.00	0	(115,080,000.00)	0
5. 2. 2. 12. 04.	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	74,668,000.00	42,000,000.00	(32,668,000.00)	(77.78)
5. 2. 2. 12. 05.	Belanja pakaian dinas upacara (PDU)	212,050,000.00	69,700,000.00	(142,350,000.00)	(204.23)
5. 2. 2. 12. 06.	Belanja pakaian sipil resmi (PSR)	50,000,000.00	0	(50,000,000.00)	0
5. 2. 2. 12. 08.	Belanja atribut	25,140,000.00	23,880,000.00	(1,260,000.00)	(5.28)
5. 2. 2. 13.	Belanja Pakaian Kerja	428,878,000.00	369,830,000.00	(59,048,000.00)	(15.97)
5. 2. 2. 13. 01.	Belanja pakaian kerja lapangan	411,548,000.00	353,500,000.00	(58,048,000.00)	(16.42)
5. 2. 2. 13. 03.	Belanja sepatu lapangan	17,330,000.00	16,330,000.00	(1,000,000.00)	(6.12)
5. 2. 2. 14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2,470,870,000.00	1,025,520,000.00	(1,445,350,000.00)	(140.94)
5. 2. 2. 14. 02.	Belanja pakaian adat daerah	654,450,000.00	373,600,000.00	(280,850,000.00)	(75.17)
5. 2. 2. 14. 03.	Belanja pakaian batik tradisional	54,700,000.00	38,500,000.00	(16,200,000.00)	(42.08)
5. 2. 2. 14. 04.	Belanja pakaian olahraga	1,196,250,000.00	240,650,000.00	(955,600,000.00)	(397.09)
5. 2. 2. 14. 05.	Belanja pakaian muslim	80,000,000.00	80,000,000.00	0	0
5. 2. 2. 14. 06.	Belanja pakaian seragam	336,350,000.00	229,020,000.00	(107,330,000.00)	(46.86)
5. 2. 2. 14. 07.	Belanja pakaian kegiatan	149,120,000.00	63,750,000.00	(85,370,000.00)	(133.91)
5. 2. 2. 15.	Belanja Perjalanan Dinas	158,158,162,181.00	71,020,055,339.00	(87,138,106,842.00)	(122.70)
5. 2. 2. 15. 01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	71,152,923,431.00	41,062,790,306.00	(30,090,133,125.00)	(73.28)
5. 2. 2. 15. 02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	85,858,098,750.00	29,857,265,033.00	(56,000,833,717.00)	(187.56)
5. 2. 2. 15. 03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	1,147,140,000.00	100,000,000.00	(1,047,140,000.00)	(1,047.14)
5. 2. 2. 16.	Belanja Bea Siswa Pendidikan PNS	539,000,000.00	435,000,000.00	(104,000,000.00)	(23.91)
5. 2. 2. 16. 02.	Belanja beasiswa tugas belajar S1	144,000,000.00	144,000,000.00	0	0
5. 2. 2. 16. 03.	Belanja beasiswa tugas belajar S2	260,000,000.00	156,000,000.00	(104,000,000.00)	(66.67)
5. 2. 2. 16. 05.	Belanja beasiswa tugas belajar spesialis	135,000,000.00	135,000,000.00	0	0
5. 2. 2. 17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2,571,900,000.00	586,025,000.00	(1,985,875,000.00)	(338.87)
5. 2. 2. 17. 01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	1,862,900,000.00	305,750,000.00	(1,557,150,000.00)	(509.29)
5. 2. 2. 17. 03.	Belanja kontribusi diklat teknis/fungsional	138,500,000.00	2,275,000.00	(136,225,000.00)	(5,987.91)
5. 2. 2. 17. 04.	Belanja kontribusi bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, dan lokakarya	290,500,000.00	142,000,000.00	(148,500,000.00)	(104.58)
5. 2. 2. 17. 06.	Belanja konstribusi diklat struktural	280,000,000.00	136,000,000.00	(144,000,000.00)	(105.88)
5. 2. 2. 20.	Belanja Pemeliharaan	28,415,128,473.00	15,896,523,454.00	(12,518,605,019.00)	(78.75)
5. 2. 2. 20. 01.	Belanja pemeliharaan jalan	4,397,899,200.00	1,697,562,800.00	(2,700,336,400.00)	(159.07)
5. 2. 2. 20. 02.	Belanja pemeliharaan jembatan	608,000,000.00	318,000,000.00	(290,000,000.00)	(91.19)
5. 2. 2. 20. 03.	Belanja pemeliharaan bangunan	17,206,951,273.00	10,680,582,154.00	(6,526,369,119.00)	(61.10)
5. 2. 2. 20. 04.	Belanja pemeliharaan jaringan	1,103,590,000.00	177,960,000.00	(925,630,000.00)	(520.13)
5. 2. 2. 20. 05.	Belanja pemeliharaan peralatan	3,796,129,000.00	2,536,346,500.00	(1,259,782,500.00)	(49.67)
5. 2. 2. 20. 06.	Belanja pemeliharaan objek dan daya tarik wisata	70,000,000.00	0	(70,000,000.00)	0
5. 2. 2. 20. 07.	Belanja pemeliharaan sistem komputerisasi (software)	18,000,000.00	8,000,000.00	(10,000,000.00)	(125.00)
5. 2. 2. 20. 08.	Belanja pemeliharaan lahan	200,000,000.00	100,000,000.00	(100,000,000.00)	(100.00)
5. 2. 2. 20. 09.	Belanja pemeliharaan perlengkapan	1,014,559,000.00	378,072,000.00	(636,487,000.00)	(168.35)
5. 2. 2. 21.	Belanja Jasa Konsultasi	4,715,712,291.00	3,457,992,500.00	(1,257,719,791.00)	(36.37)
5. 2. 2. 21. 01.	Belanja jasa konsultasi penelitian	1,760,000,000.00	1,185,000,000.00	(575,000,000.00)	(48.52)
5. 2. 2. 21. 02.	Belanja jasa konsultasi perencanaan	2,727,685,546.00	1,975,871,000.00	(751,814,546.00)	(38.05)
5. 2. 2. 21. 03.	Belanja jasa konsultasi pengawasan	168,026,745.00	297,121,500.00	129,094,755.00	43.45
5. 2. 2. 21. 05.	Belanja jasa konsultasi IT	60,000,000.00	0	(60,000,000.00)	0
5. 2. 2. 23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25,706,185,000.00	7,604,591,000.00	(18,101,594,000.00)	(238.04)
5. 2. 2. 23. 01.	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	12,475,676,000.00	2,013,774,000.00	(10,461,902,000.00)	(519.52)
5. 2. 2. 23. 02.	Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	13,230,509,000.00	5,590,817,000.00	(7,639,692,000.00)	(136.65)
5. 2. 2. 26.	Belanja Honorarium PNS	5,651,305,400.00	1,982,084,000.00	(3,669,221,400.00)	(185.12)
5. 2. 2. 26. 01.	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/fasilitator PNS	5,617,005,400.00	1,860,484,000.00	(3,756,521,400.00)	(201.91)
5. 2. 2. 26. 02.	Honorarium pelaksana kegiatan	34,300,000.00	121,600,000.00	87,300,000.00	71.79
5. 2. 2. 27.	Belanja Honorarium Non PNS	15,978,910,000.00	3,259,958,200.00	(12,718,951,800.00)	(390.16)

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN I
KABAG HUKUM

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5. 2. 2. 27. 02.	Honorarium pelaksana kegiatan	923,100,000.00	598,900,000.00	(324,200,000.00)	(54.13)
5. 2. 2. 29.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4,581,200,000.00	432,100,000.00	(4,149,100,000.00)	(960.22)
5. 2. 2. 29. 01.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	374,000,000.00	0	(374,000,000.00)	0
5. 2. 2. 29. 02.	Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat	4,207,200,000.00	432,100,000.00	(3,775,100,000.00)	(873.66)
5. 2. 2. 30.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	7,075,323,167.00	0	(7,075,323,167.00)	0
5. 2. 2. 30. 01.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	7,075,323,167.00	0	(7,075,323,167.00)	0
5. 2. 2. 31.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	351,500,000.00	275,500,000.00	(76,000,000.00)	(27.59)
5. 2. 2. 31. 01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	351,500,000.00	273,000,000.00	(78,500,000.00)	(28.75)
5. 2. 2. 31. 03.	Belanja kontribusi bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, dan lokakarya	0	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00
5. 2. 3.	Belanja Modal	314,439,727,480.00	163,331,835,531.00	(151,107,891,949.00)	(48.06)
5. 2. 3. 01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	15,324,188,400.00	6,399,640,000.00	(8,924,548,400.00)	(139.45)
5. 2. 3. 01. 01.	Belanja modal pengadaan tanah kantor	700,000,000.00	805,000,000.00	105,000,000.00	13.04
5. 2. 3. 01. 02.	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit	215,000,000.00	45,000,000.00	(170,000,000.00)	(377.78)
5. 2. 3. 01. 03.	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas	150,000,000.00	40,000,000.00	(110,000,000.00)	(275.00)
5. 2. 3. 01. 05.	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan taman kanak-kanak	250,000,000.00	210,500,000.00	(39,500,000.00)	(18.76)
5. 2. 3. 01. 06.	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar	173,000,000.00	75,000,000.00	(98,000,000.00)	(130.67)
5. 2. 3. 01. 07.	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan	1,173,899,000.00	40,000,000.00	(1,133,899,000.00)	(2,834.75)
5. 2. 3. 01. 23.	Belanja modal pengadaan tanah sarana stadion olahraga	500,000,000.00	350,000,000.00	(150,000,000.00)	(42.86)
5. 2. 3. 01. 24.	Belanja modal pengadaan tanah perumahan	0	0	0	0
5. 2. 3. 01. 32.	Belanja Modal pengadaan Tanah Jalan	7,012,289,400.00	4,514,140,000.00	(2,498,149,400.00)	(55.34)
5. 2. 3. 01. 33.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kuburan	250,000,000.00	40,000,000.00	(210,000,000.00)	(525.00)
5. 2. 3. 01. 34.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air	200,000,000.00	240,000,000.00	40,000,000.00	16.67
5. 2. 3. 01. 35.	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Kegiatan Pariwisata	4,700,000,000.00	40,000,000.00	(4,660,000,000.00)	(11,650.00)
5. 2. 3. 03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	4,594,138,928.00	1,877,400,000.00	(2,716,738,928.00)	(144.71)
5. 2. 3. 03. 04.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus	1,050,000,000.00	0	(1,050,000,000.00)	0
5. 2. 3. 03. 05.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	600,000,000.00	600,000,000.00	0	0
5. 2. 3. 03. 06.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck	875,000,000.00	0	(875,000,000.00)	0
5. 2. 3. 03. 09.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	211,000,000.00	211,000,000.00	0	0
5. 2. 3. 03. 11.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran	1,313,738,928.00	522,000,000.00	(791,738,928.00)	(151.67)
5. 2. 3. 03. 12.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	544,400,000.00	544,400,000.00	0	0
5. 2. 3. 04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	301,000,000.00	0	(301,000,000.00)	0
5. 2. 3. 04. 01.	Belanja modal pengadaan gerobak	1,000,000.00	0	(1,000,000.00)	0
5. 2. 3. 04. 05.	Belanja modal pengadaan karavan	300,000,000.00	0	(300,000,000.00)	0
5. 2. 3. 05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	2,615,002,051.00	2,615,002,051.00	0	0
5. 2. 3. 05. 02.	Belanja modal pengadaan kapal feri	2,615,002,051.00	2,615,002,051.00	0	0
5. 2. 3. 05. 03.	Belanja modal pengadaan speed boat	0	0	0	0
5. 2. 3. 06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	75,000,000.00	0	(75,000,000.00)	0
5. 2. 3. 06. 04.	Belanja modal pengadaan perahu karet	75,000,000.00	0	(75,000,000.00)	0
5. 2. 3. 08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	789,090,000.00	227,000,000.00	(562,090,000.00)	(247.62)
5. 2. 3. 08. 05.	Belanja modal pengadaan mesin generator	627,000,000.00	227,000,000.00	(400,000,000.00)	(176.21)
5. 2. 3. 08. 06.	Belanja modal pengadaan peralatan bengkel	162,090,000.00	0	(162,090,000.00)	0
5. 2. 3. 09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	160,500,000.00	102,500,000.00	(58,000,000.00)	(56.59)
5. 2. 3. 09. 05.	Belanja modal pengadaan mesin potong	154,500,000.00	96,500,000.00	(58,000,000.00)	(60.10)
5. 2. 3. 09. 06.	Belanja modal pengadaan pompa air	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0
5. 2. 3. 09. 10.	Belanja modal pengadaan peralatan peternakan lainnya	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0
5. 2. 3. 10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1,290,320,000.00	1,086,706,000.00	(203,614,000.00)	(18.74)
5. 2. 3. 10. 02.	Belanja modal pengadaan mesin hitung	39,580,000.00	0	(39,580,000.00)	0
5. 2. 3. 10. 08.	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	79,652,000.00	62,152,000.00	(17,500,000.00)	(28.16)

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN I
Ka
KABAG HUKUM

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5. 2. 3. 10. 11.	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	39,550,000.00	39,550,000.00	0	0
5. 2. 3. 10. 12.	Belanja modal pengadaan alat pendingin ruangan	823,038,000.00	787,204,000.00	(35,834,000.00)	(4.55)
5. 2. 3. 10. 14.	Belanja modal pengadaan peralatan audio visual	15,500,000.00	20,000,000.00	4,500,000.00	22.50
5. 2. 3. 10. 16.	Belanja modal pengadaan penghisap debu	8,500,000.00	21,100,000.00	12,600,000.00	59.72
5. 2. 3. 10. 17.	Belanja modal pengadaan papan plang kantor	2,500,000.00	2,500,000.00	0	0
5. 2. 3. 10. 20.	Belanja modal pengadaan kipas angin	37,200,000.00	11,200,000.00	(26,000,000.00)	(232.14)
5. 2. 3. 10. 21.	Belanja modal pengadaan TV	231,000,000.00	143,000,000.00	(88,000,000.00)	(61.54)
5. 2. 3. 11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,386,760,885.00	1,025,224,885.00	(361,536,000.00)	(35.26)
5. 2. 3. 11. 02.	Belanja modal pengadaan almari	302,574,885.00	237,824,885.00	(64,750,000.00)	(27.23)
5. 2. 3. 11. 03.	Belanja modal pengadaan brankas	15,000,000.00	0	(15,000,000.00)	0
5. 2. 3. 11. 04.	Belanja modal pengadaan filling kabinet	215,986,000.00	154,100,000.00	(61,886,000.00)	(40.16)
5. 2. 3. 11. 05.	Belanja modal pengadaan white board	0	0	0	0
5. 2. 3. 11. 07.	Belanja modal pengadaan hiasan ruang kantor	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0
5. 2. 3. 11. 08.	Belanja modal pengadaan papan pengumuman	4,800,000.00	4,800,000.00	0	0
5. 2. 3. 11. 10.	Belanja modal pengadaan tenda	680,000,000.00	581,000,000.00	(99,000,000.00)	(17.04)
5. 2. 3. 11. 11.	Belanja modal pengadaan papan struktur	31,800,000.00	9,500,000.00	(22,300,000.00)	(234.74)
5. 2. 3. 11. 13.	Belanja modal pengadaan tangki air	131,600,000.00	3,000,000.00	(128,600,000.00)	(4,286.67)
5. 2. 3. 11. 15.	Belanja modal pengadaan tempat cuci tangan	0	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00
5. 2. 3. 12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9,347,157,196.00	5,020,698,500.00	(4,326,458,696.00)	(86.17)
5. 2. 3. 12. 01.	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	238,000,000.00	33,000,000.00	(205,000,000.00)	(621.21)
5. 2. 3. 12. 02.	Belanja modal pengadaan komputer/PC	2,104,363,500.00	1,657,928,500.00	(446,435,000.00)	(26.93)
5. 2. 3. 12. 03.	Belanja modal pengadaan komputer note book	1,945,910,000.00	1,718,676,000.00	(227,234,000.00)	(13.22)
5. 2. 3. 12. 04.	Belanja modal pengadaan printer	896,721,496.00	626,709,000.00	(270,012,496.00)	(43.08)
5. 2. 3. 12. 05.	Belanja modal pengadaan scanner	103,300,000.00	25,800,000.00	(77,500,000.00)	(300.39)
5. 2. 3. 12. 06.	Belanja modal pengadaan monitor/display	0	15,950,000.00	15,950,000.00	100.00
5. 2. 3. 12. 08.	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	539,700,000.00	548,500,000.00	8,800,000.00	1.60
5. 2. 3. 12. 09.	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flasdisk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	24,935,000.00	16,635,000.00	(8,300,000.00)	(49.89)
5. 2. 3. 12. 10.	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	2,984,227,200.00	107,500,000.00	(2,876,727,200.00)	(2,676.03)
5. 2. 3. 12. 11.	Belanja modal pengadaan software/aplikasi komputer	510,000,000.00	270,000,000.00	(240,000,000.00)	(88.89)
5. 2. 3. 13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2,063,065,500.00	1,503,567,500.00	(559,498,000.00)	(37.21)
5. 2. 3. 13. 01.	Belanja modal pengadaan meja kerja	497,825,000.00	428,915,000.00	(68,910,000.00)	(16.07)
5. 2. 3. 13. 02.	Belanja modal pengadaan meja rapat	508,857,000.00	331,500,000.00	(177,357,000.00)	(53.50)
5. 2. 3. 13. 03.	Belanja modal pengadaan meja makan	24,000,000.00	24,000,000.00	0	0
5. 2. 3. 13. 04.	Belanja modal pengadaan kursi kerja	487,921,000.00	374,190,000.00	(113,731,000.00)	(30.39)
5. 2. 3. 13. 05.	Belanja modal pengadaan kursi rapat	428,962,500.00	281,462,500.00	(147,500,000.00)	(52.40)
5. 2. 3. 13. 08.	Belanja modal pengadaan sofa	86,200,000.00	40,200,000.00	(46,000,000.00)	(114.43)
5. 2. 3. 13. 12.	Belanja modal pengadaan meja resepsionis	0	0	0	0
5. 2. 3. 13. 13.	Belanja modal pengadaan kursi tunggu	29,300,000.00	23,300,000.00	(6,000,000.00)	(25.75)
5. 2. 3. 14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	145,900,000.00	66,900,000.00	(79,000,000.00)	(118.09)
5. 2. 3. 14. 01.	Belanja modal pengadaan tabung gas	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0
5. 2. 3. 14. 02.	Belanja modal pengadaan kompor gas	1,100,000.00	1,100,000.00	0	0
5. 2. 3. 14. 04.	Belanja modal pengadaan dispenser	17,000,000.00	17,500,000.00	500,000.00	2.86
5. 2. 3. 14. 05.	Belanja modal pengadaan kulkas	10,800,000.00	11,300,000.00	500,000.00	4.42
5. 2. 3. 14. 06.	Belanja modal pengadaan rak piring	35,000,000.00	35,000,000.00	0	0
5. 2. 3. 14. 07.	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	80,000,000.00	0	(80,000,000.00)	0
5. 2. 3. 15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	454,500,000.00	508,350,400.00	53,850,400.00	10.59
5. 2. 3. 15. 03.	Belanja modal pengadaan karpet	54,000,000.00	25,000,000.00	(29,000,000.00)	(116.00)
5. 2. 3. 15. 04.	Belanja modal pengadaan gorden/tirai	400,500,000.00	483,350,400.00	82,850,400.00	17.14
5. 2. 3. 15. 09.	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	0	0	0	0
5. 2. 3. 16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1,248,976,016.00	643,245,000.00	(605,731,016.00)	(94.17)
5. 2. 3. 16. 01.	Belanja modal pengadaan kamera	297,500,000.00	144,500,000.00	(153,000,000.00)	(105.88)
5. 2. 3. 16. 02.	Belanja modal pengadaan handycam	93,700,000.00	10,000,000.00	(83,700,000.00)	(837.00)
5. 2. 3. 16. 03.	Belanja modal pengadaan proyektor	486,600,000.00	320,000,000.00	(166,600,000.00)	(52.06)
5. 2. 3. 16. 05.	Belanja modal pengadaan sound system	326,771,000.00	135,745,000.00	(191,026,000.00)	(140.72)
5. 2. 3. 16. 06.	Belanja modal pengadaan alat perekam	42,405,016.00	31,000,000.00	(11,405,016.00)	(36.79)

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASSISTEN I
Ka.

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5. 2. 3. 17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	237,700,000.00	52,522,000.00	(185,178,000.00)	(352.57)
5. 2. 3. 17. 01.	Belanja modal pengadaan telepon	36,100,000.00	26,100,000.00	(10,000,000.00)	(38.31)
5. 2. 3. 17. 04.	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (handy talkie)	154,600,000.00	26,422,000.00	(128,178,000.00)	(485.12)
5. 2. 3. 17. 08.	Belanja modal pengadaan peralatan internet wireless	47,000,000.00	0	(47,000,000.00)	0
5. 2. 3. 18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	22,512,000.00	22,512,000.00	0	0
5. 2. 3. 18. 04.	Belanja modal pengadaan alat GPS	9,512,000.00	9,512,000.00	0	0
5. 2. 3. 18. 13.	Belanja modal pengadaan alat ukur digital	13,000,000.00	13,000,000.00	0	0
5. 2. 3. 19.	Belanja Modal pengadaan Alat-alat Kedokteran	9,098,791,367.00	7,232,935,823.00	(1,865,855,544.00)	(25.80)
5. 2. 3. 19. 01.	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	6,664,809,495.00	6,239,810,495.00	(424,999,000.00)	(6.81)
5. 2. 3. 19. 02.	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi	8,706,560.00	8,706,560.00	0	0
5. 2. 3. 19. 05.	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah	2,425,275,312.00	984,418,768.00	(1,440,856,544.00)	(146.37)
5. 2. 3. 20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	195,860,000.00	129,310,650.00	(66,549,350.00)	(51.46)
5. 2. 3. 20. 02.	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi	38,020,000.00	45,810,650.00	7,790,650.00	17.01
5. 2. 3. 20. 09.	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium penguji kualitas air	74,340,000.00	0	(74,340,000.00)	0
5. 2. 3. 20. 11.	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan	83,500,000.00	83,500,000.00	0	0
5. 2. 3. 21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	108,053,774,600.00	33,011,701,200.00	(75,042,073,400.00)	(227.32)
5. 2. 3. 21. 01.	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	344,177,000.00	0	(344,177,000.00)	0
5. 2. 3. 21. 04.	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan lapis hotmix	33,214,012,600.00	13,023,000,000.00	(20,191,012,600.00)	(155.04)
5. 2. 3. 21. 06.	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan beton bertulang	45,357,090,000.00	5,815,092,000.00	(39,541,998,000.00)	(679.99)
5. 2. 3. 21. 07.	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan semen	28,701,431,000.00	13,955,077,200.00	(14,746,353,800.00)	(105.67)
5. 2. 3. 21. 08.	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan tanah	437,064,000.00	218,532,000.00	(218,532,000.00)	(100.00)
5. 2. 3. 22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	4,140,152,100.00	648,840,708.00	(3,491,311,392.00)	(538.08)
5. 2. 3. 22. 04.	Belanja modal pengadaan konstruksi penyebrangan diatas air	4,140,152,100.00	648,840,708.00	(3,491,311,392.00)	(538.08)
5. 2. 3. 23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	41,881,171,482.00	20,599,297,250.00	(21,281,874,232.00)	(103.31)
5. 2. 3. 23. 05.	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	2,743,587,000.00	0	(2,743,587,000.00)	0
5. 2. 3. 23. 06.	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	5,612,492,000.00	2,941,852,000.00	(2,670,640,000.00)	(90.78)
5. 2. 3. 23. 10.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase	32,485,092,482.00	16,617,445,250.00	(15,867,647,232.00)	(95.49)
5. 2. 3. 23. 12.	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan limbah	1,040,000,000.00	1,040,000,000.00	0	0
5. 2. 3. 24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan jalan, Taman dan Hutan Kota	1,093,578,000.00	875,830,000.00	(217,748,000.00)	(24.86)
5. 2. 3. 24. 02.	Belanja modal pengadaan lampu hias taman	563,000,000.00	358,000,000.00	(205,000,000.00)	(57.26)
5. 2. 3. 24. 04.	Belanja modal pengadaan lampu penerangan jalan	530,578,000.00	517,830,000.00	(12,748,000.00)	(2.46)
5. 2. 3. 25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	455,012,000.00	282,522,000.00	(172,490,000.00)	(61.05)
5. 2. 3. 25. 01.	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	455,012,000.00	282,522,000.00	(172,490,000.00)	(61.05)
5. 2. 3. 26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	105,547,814,196.00	78,327,574,605.00	(27,220,239,591.00)	(34.75)
5. 2. 3. 26. 01.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	33,428,204,776.00	32,875,997,538.00	(552,207,238.00)	(1.68)
5. 2. 3. 26. 03.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	2,393,112,840.00	2,185,287,016.00	(207,825,824.00)	(9.51)
5. 2. 3. 26. 07.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian tugu peringatan	0	0	0	0
5. 2. 3. 26. 08.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian pelabuhan/tambatan perahu	6,953,764,000.00	1,202,558,000.00	(5,751,206,000.00)	(478.25)
5. 2. 3. 26. 09.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung/tempat	17,150,141,649.00	8,887,493,628.00	(8,262,648,021.00)	(92.97)
5. 2. 3. 26. 12.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan lainnya	45,284,352,931.00	32,973,278,423.00	(12,311,074,508.00)	(37.34)
5. 2. 3. 26. 13.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian partisi ruangan	338,238,000.00	202,960,000.00	(135,278,000.00)	(66.65)
5. 2. 3. 27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	31,120,000.00	14,832,000.00	(16,288,000.00)	(109.82)
5. 2. 3. 27. 10.	Belanja modal pengadaan buku	1,000,000.00	0	(1,000,000.00)	0

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN I
Ka.

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5. 2. 3. 27. 21.	Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan	12,000,000.00	1,032,000.00	(10,968,000.00)	(1,062.79)
5. 2. 3. 28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	437,066,000.00	290,100,000.00	(146,966,000.00)	(50.66)
5. 2. 3. 28. 07.	Belanja modal pengadaan alat musik	280,000,000.00	280,000,000.00	0	0
5. 2. 3. 28. 08.	Belanja modal pengadaan alat kesenian	7,066,000.00	10,100,000.00	3,034,000.00	30.04
5. 2. 3. 28. 09.	Belanja modal pengadaan benda-benda budaya	150,000,000.00	0	(150,000,000.00)	0
5. 2. 3. 29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	22,000,000.00	2,000,000.00	(20,000,000.00)	(1,000.00)
5. 2. 3. 29. 03.	Belanja modal pengadaan tanaman	22,000,000.00	2,000,000.00	(20,000,000.00)	(1,000.00)
5. 2. 3. 32.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	1,064,618,959.00	765,622,959.00	(298,996,000.00)	(39.05)
5. 2. 3. 32. 02.	Belanja modal pengadaan papan reklame/iklan	105,000,000.00	5,000,000.00	(100,000,000.00)	(2,000.00)
5. 2. 3. 32. 03.	Belanja modal pengadaan marka/rambu-rambu	548,080,959.00	559,100,959.00	11,020,000.00	1.97
5. 2. 3. 32. 06.	Belanja modal pengadaan kasur	1,500,000.00	1,500,000.00	0	0
5. 2. 3. 32. 09.	Belanja modal pengadaan alat-alat selam	16,000,000.00	0	(16,000,000.00)	0
5. 2. 3. 32. 17.	Belanja modal alat kantor rumah tangga lainnya	287,638,000.00	200,022,000.00	(87,616,000.00)	(43.80)
5. 2. 3. 32. 24.	Belanja modal pengadaan mesin kemasan produk	106,400,000.00	0	(106,400,000.00)	0
5. 2. 3. 34.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOS	2,362,957,800.00	0	(2,362,957,800.00)	0
5. 2. 3. 34. 01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOS	2,362,957,800.00	0	(2,362,957,800.00)	0
	Jumlah	**1,350,202,000,000.00**	**1,055,766,015,650.59**	**(294,435,984,349.41)**	**(27.89)**
	Surplus / (Defisit)	**(133,002,000,000.00)**	**(158,646,042,860.59)**	**(25,644,042,860.59)**	**0**
6.	**PEMBIAYAAN**				
6. 1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**138,002,000,000.00**	**158,646,042,860.59**	**20,644,042,860.59**	**14.96**
6. 1. 1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	138,002,000,000.00	153,384,124,375.59	15,382,124,375.59	11.15
6. 1. 1. 02.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	40,000,000,000.00	29,895,914,221.69	(10,104,085,778.31)	(33.80)
6. 1. 1. 02. 02.	Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam	40,000,000,000.00	29,895,914,221.69	(10,104,085,778.31)	(33.80)
6. 1. 1. 04.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	98,002,000,000.00	123,488,210,153.90	25,486,210,153.90	20.64
6. 1. 1. 04. 01.	Belanja pegawai dari belanja tidak langsung	29,000,000,000.00	22,880,488,519.50	(6,119,511,480.50)	(26.75)
6. 1. 1. 04. 02.	Belanja pegawai dari belanja langsung	30,002,000,000.00	9,339,489,879.00	(20,662,510,121.00)	(221.24)
6. 1. 1. 04. 03.	Belanja barang dan jasa	30,000,000,000.00	57,280,173,616.00	27,280,173,616.00	47.63
6. 1. 1. 04. 04.	Belanja modal	9,000,000,000.00	33,988,058,139.40	24,988,058,139.40	73.52
6. 1. 3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	5,261,918,485.00	5,261,918,485.00	0
6. 1. 3. 03.	Hasil Penghentian Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0	5,261,918,485.00	5,261,918,485.00	100.00
6. 1. 3. 03. 01.	Hasil Penghentian Dana Bergulir	0	5,261,918,485.00	5,261,918,485.00	100.00
	Jumlah	**138,002,000,000.00**	**158,646,042,860.59**	**20,644,042,860.59**	**14.96**
6. 2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**5,000,000,000.00**	**0**	**(5,000,000,000.00)**	**(100.00)**
6. 2. 2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,000,000,000.00	0	(5,000,000,000.00)	(100.00)
6. 2. 2. 02.	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5,000,000,000.00	0	(5,000,000,000.00)	0
6. 2. 2. 02. 01.	PT. BANK RIAUKEPRI	5,000,000,000.00	0	(5,000,000,000.00)	0
	Jumlah	**5,000,000,000.00**	**0**	**(5,000,000,000.00)**	**(100.00)**
	Pembiayaan neto	**133,002,000,000.00**	**158,646,042,860.59**	**25,644,042,860.59**	**19.28**
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA/SIKPA)		**0**	**0**	**0**	**0**

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN I	
Ka	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAH : 1.01. PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01. Dinas Pendidikan

Kode Rekening										Uraian Rekening	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN			
											Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	Uraian Penjabaran	Penjabaran	Tarif	Jumlah
1										2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**01.**	**1. 01. 01.**	**00**	**00**	**5.**					**BELANJA**	**235,693,693,046.00**	**178,830,582,681.00**	**(56,863,110,365.00)**	(24.13)				
1.	**01.**	**1. 01. 01.**	**00**	**00**	**5.**	**1.**				**Belanja Tidak Langsung**	**129,620,896,282.00**	**118,015,764,512.00**	**(11,605,131,770.00)**	(8.95)				
1.	**01.**	**1. 01. 01.**	**00**	**00**	**5.**	**1.**	**1.**			**Belanja Pegawai**	**129,620,896,282.00**	**118,015,764,512.00**	**(11,605,131,770.00)**	(8.95)				
1.	**01.**	**1. 01. 01.**	**00**	**00**	**5.**	**1.**	**1.**	**01.**		**Gaji dan Tunjangan**	**102,004,168,282.00**	**84,569,255,372.00**	**(17,434,912,910.00)**	(17.09)				
1.	01.	1. 01. 01.	00	00	5.	1.	1.	01.	01.	Gaji pokok PNS/uang representasi 1)	64,423,547,282.00	49,039,364,920.00	(15,384,182,362.00)	(23.88)				
															Gaji pokok PNS/uang representasi 1)	1 Tahun	49,039,364,920.00	49,039,364,920.00
1.	01.	1. 01. 01.	00	00	5.	1.	1.	01.	02.	Tunjangan keluarga	7,583,108,000.00	4,778,275,978.00	(2,804,832,022.00)	(36.99)				
															Tunjangan keluarga	1 Tahun	4,778,275,978.00	4,778,275,978.00
1.	01.	1. 01. 01.	00	00	5.	1.	1.	01.	03.	Tunjangan jabatan 1)	262,159,000.00	175,350,000.00	(86,809,000.00)	(33.11)				
															Tunjangan jabatan 1)	1 Tahun	175,350,000.00	175,350,000.00
1.	01.	1. 01. 01.	00	00	5.	1.	1.	01.	04.	Tunjangan fungsional	4,162,457,000.00	3,540,586,000.00	(621,871,000.00)	(14.94)				
															Tunjangan fungsional	1 Tahun	3,540,586,000.00	3,540,586,000.00
1.	01.	1. 01. 01.	00	00	5.	1.	1.	01.	06.	Tunjangan beras 1)	3,452,642,000.00	3,201,833,040.00	(250,808,960.00)	(7.26)				
															Tunjangan beras 1)	1 Tahun	3,201,833,040.00	3,201,833,040.00
1.	01.	1. 01. 01.	00	00	5.	1.	1.	01.	07.	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	1,116,000.00	6,179,558.00	5,063,558.00	453.72				
															Tunjangan PPh/tunjangan khusus	1 Tahun	6,179,558.00	6,179,558.00
1.	01.	1. 01. 01.	00	00	5.	1.	1.	01.	08.	Pembulatan gaji	768,000.00	768,000.00	0.00	0				
															Pembulatan gaji	1 Tahun	768,000.00	768,000.00
1.	01.	1. 01. 01.	00	00	5.	1.	1.	01.	09.	Iuran asuransi kesehatan	1,645,294,000.00	3,145,825,236.00	1,500,531,236.00	91.20				
															Iuran asuransi kesehatan	1 Tahun	3,145,825,236.00	3,145,825,236.00
1.	01.	1. 01. 01.	00	00	5.	1.	1.	01.	21.	Tunjangan umum	624,330,000.00	906,500,000.00	282,170,000.00	45.20				
															Tunjangan umum	1 Tahun	906,500,000.00	906,500,000.00
1.	01.	1. 01. 01.	00	00	5.	1.	1.	01.	22.	Iuran jaminan kecelakaan kerja	119,425,000.00	100,880,676.00	(18,544,324.00)	(15.53)				
															Iuran jaminan kecelakaan kerja	1 Tahun	100,880,676.00	100,880,676.00
1.	01.	1. 01. 01.	00	00	5.	1.	1.	01.	23.	Iuran jaminan kematian	358,273,000.00	302,642,964.00	(55,630,036.00)	(15.53)				
															Iuran jaminan kematian	1 Tahun	302,642,964.00	302,642,964.00
1.	01.	1. 01. 01.	00	00	5.	1.	1.	01.	25.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	18,240,328,000.00	18,240,328,000.00	0.00	0				
															Tunjangan Profesi Guru PNSD	1 Tahun	18,240,328,000.00	18,240,328,000.00
1.	01.	1. 01. 01.	00	00	5.	1.	1.	01.	26.	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	696,000,000.00	696,000,000.00	0.00	0				

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASSISTEN I
Ka
KABAG HUKUM

9N

Kode Rekening										Uraian Rekening	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN			
											Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	Uraian Penjabaran	Penjabaran	Tarif	Jumlah
1										2	3	4	5	6	7	8	9	10
															Snack Kotak	1400 KOTAK	10,000.00	14,000,000.00
3.	**05.**	**3. 05. 21.**	**30.**	**03.**	**5.**	**2.**	**2.**	**12.**		**Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya**	**37,500,000.00**	**25,500,000.00**	**(12,000,000.00)**	(32.00)				
3.	05.	3. 05. 21.	30.	03.	5.	2.	2.	12.	05.	Belanja pakaian dinas upacara (PDU)	37,500,000.00	25,500,000.00	(12,000,000.00)	(32.00)				
															Belanja pakaian dinas upacara (PDU)	17 Stell	1,500,000.00	25,500,000.00
3.	**05.**	**3. 05. 21.**	**30.**	**03.**	**5.**	**2.**	**2.**	**14.**		**Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu**	**17,050,000.00**	**17,050,000.00**	**0.00**	0				
3.	05.	3. 05. 21.	30.	03.	5.	2.	2.	14.	04.	Belanja pakaian olahraga	17,050,000.00	17,050,000.00	0.00	0				
															Belanja pakaian olahraga	31 OK	550,000.00	17,050,000.00
										JUMLAH BELANJA	**3,162,012,533.00**	**2,732,323,087.00**	**(429,689,446.00)**	**(13.59)**				

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN I	
Ka	
KABAG HUKUM	

٩٦٨

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN ANGGARAN 2020
DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
5.1.5.01.02. Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan untuk perlindungan sosial			
Belanja bantuan sosial penanggulangan dampak sosial Covid-19			
1	BELANJA BANTUAN SOSIAL PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL COVID-19	KABUPATEN NATUNA	1,499,400,000.00
		Total Belanja bantuan sosial penanggulangan dampak sosial Covid-19	1,499,400,000.00
Belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan			
2	BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN	KABUPATEN NATUNA	500,000,000.00
		Total Belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan	500,000,000.00
		Total Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan untuk perlindungan sosia	1,999,400,000.00
		TOTAL	**1,999,400,000.00**

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN I	
Ka	
KABAG HUKUM	

4U